



Penerapan Prinsip Efisiensi dalam Pengelolaan Dana BOS dan BPP di SMK Negeri 2 Palangka Raya

Aan Mirkan^{1*}, Yefta², Mersi Faot³, Yulika⁴, Feronika S.Y⁵

¹⁻⁵ Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: aanmirkan2306@gmail.com^{1*}, yeftayeftaa8@gmail.com², mersifaot05@gmail.com³,

yulikay679@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: aanmirkan2306@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the implementation of efficiency principles in the management of School Operational Assistance (BOS) funds and Education Operational Costs (BPP) at SMK Negeri 2 Palangka Raya. A descriptive qualitative approach was employed with purposive sampling. Research informants comprised the BOS treasurer, BPP secretary, school principal, ARKAS operator, and school committee chairperson. Data were gathered through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model through three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing. Findings reveal that fund management has broadly complied with the provisions of Ministry of Education Regulation Number 63 of 2022 as amended by Regulation Number 63 of 2023, encompassing ARKAS-based planning, phased disbursement, financial administration, supervision, and periodic reporting. Nevertheless, persistent challenges were identified, namely delayed BOS fund disbursement, insufficient accounting expertise among staff, suboptimal integration of digital financial systems, and the absence of objective budget-priority instruments. This study offers a distinctive contribution by examining the integrated management of BOS and BPP funds within vocational schools characterized by practice-based learning and elevated operational costs.*

Keywords: ARKAS; BOS Funds; BPP; Educational Financial Management; Efficiency.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) di SMK Negeri 2 Palangka Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Informan terdiri atas bendahara BOS, sekretaris BPP, kepala sekolah, operator ARKAS, dan ketua komite sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS dan BPP secara umum telah sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 jo. Nomor 63 Tahun 2023 melalui perencanaan berbasis ARKAS, penyaluran bertahap, penatausahaan, pengawasan, dan pelaporan berkala. Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih ditemukan, yakni keterlambatan pencairan dana BOS, keterbatasan kompetensi akuntansi pada sumber daya manusia, belum terintegrasinya sistem informasi keuangan digital untuk pembukuan harian, serta belum tersedianya instrumen baku pengukur prioritas anggaran secara objektif. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis pengelolaan terpadu BOS dan BPP di sekolah kejuruan berbasis praktik teknik yang memiliki karakteristik biaya operasional tinggi.

Kata kunci: ARKAS; Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP); Dana BOS; Efisiensi; Manajemen Pembiayaan Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen strategis dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas (Arifudin, 2021). Tanpa perencanaan keuangan yang tertib dan berbasis prioritas, sekolah akan kesulitan memenuhi kebutuhan operasional secara optimal. Dalam konteks ini, efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan upaya sistematis memaksimalkan capaian pendidikan dari setiap rupiah yang tersedia. Hal ini sejalan dengan pandangan Mulyono (2010) yang menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan yang efisien

menghendaki keseimbangan antara input sumber daya dengan output pembelajaran yang terukur.

Era digitalisasi administrasi sekolah ditandai dengan penerapan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang diwajibkan pemerintah sebagai instrumen pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Prihanarko dan Hidayati (2023) menunjukkan bahwa adopsi sistem informasi dalam manajemen pembiayaan sekolah berkorelasi positif dengan peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Namun, keberadaan teknologi tidak otomatis menjamin efisiensi apabila sumber daya manusia pengelolanya belum memiliki kompetensi yang memadai.

Sumber dana yang dikelola sekolah pada umumnya berasal dari dua kelompok utama. Pertama, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dari pemerintah pusat yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Kedua, dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang bersumber dari kontribusi orang tua siswa dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh dana BOS (dalam jurnal Hikmah, dkk 2025).

SMK Negeri 2 Palangka Raya menghadapi tekanan pembiayaan yang lebih kompleks dibandingkan sekolah menengah umum. Kebutuhan praktik kejuruan, perawatan mesin bengkel, pengadaan bahan habis pakai, serta pembayaran gaji tenaga honorer menjadi beban biaya yang tidak sepenuhnya tercakup dalam alokasi BOS. Berdasarkan pengamatan awal, sekolah telah membangun mekanisme pengelolaan keuangan yang terstruktur melalui rapat koordinasi tahunan yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, tim keuangan, dan komite sekolah. Kendati demikian, tantangan berupa keterlambatan pencairan dana, keterbatasan tenaga akuntansi, dan dinamika regulasi yang kerap berubah masih menghambat penerapan prinsip efisiensi secara menyeluruh.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan dana BOS dari berbagai sudut, antara lain Noor dan Monita (2022) tentang efisiensi alokasi dana pada masa pandemi, Saifrizal dan Yusuf (2023) tentang akuntabilitas pelaporan berbasis regulasi, serta Ningsi (2024) tentang efektivitas pelaporan melalui ARKAS. Namun, kajian yang secara spesifik menelaah integrasi pengelolaan BOS dan BPP di lingkungan SMK di Kalimantan Tengah masih sangat jarang dilakukan. Kesenjangan literatur inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, dengan tujuan menganalisis secara mendalam penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan kedua sumber dana tersebut, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis temuan lapangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Efisiensi dalam Pembiayaan Pendidikan

Efisiensi pembiayaan pendidikan merupakan prinsip fundamental yang menghendaki pencapaian tujuan secara optimal dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Mulyono (2010) membedakan efisiensi ke dalam dua dimensi: efisiensi internal, yang mengukur hubungan antara besaran input pembiayaan dengan output berupa hasil belajar siswa, dan efisiensi eksternal, yang mengevaluasi hubungan antara biaya pendidikan yang dikeluarkan dengan manfaat jangka panjang bagi individu dan masyarakat. Konsep biaya peluang (opportunity cost) menjadi krusial dalam konteks ini, karena setiap rupiah yang dialokasikan untuk satu aktivitas sekaligus berarti melepaskan potensi manfaat dari pilihan penggunaan lainnya.

Relevansi prinsip efisiensi semakin nyata pada sekolah menengah kejuruan yang menanggung biaya operasional lebih tinggi akibat tuntutan kegiatan praktik dan pemeliharaan peralatan. Azhari dan Kurniady (2015) membuktikan bahwa manajemen pembiayaan dan fasilitas secara simultan berkontribusi sebesar 38,5% terhadap peningkatan mutu sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa alokasi anggaran yang selektif dan terencana bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Komponen Manajemen Pembiayaan Pendidikan

(Matin (2014) mengidentifikasi enam komponen yang membentuk sistem manajemen pembiayaan pendidikan secara menyeluruh: Pertama penyusunan anggaran, Kedua pelaksanaan anggaran, Ketiga pengalokasian anggaran, Keempat penatausahaan keuangan, Kelima pertanggungjawaban keuangan, dan Keenam pengawasan anggaran. Keenam komponen ini harus dijalankan secara terpadu dan berkesinambungan agar pengelolaan keuangan sekolah berjalan efektif. Handayani dkk. (2020) membuktikan bahwa implementasi manajemen pembiayaan yang baik mampu mencapai tingkat efektivitas hingga 86,12%, dengan pengalokasian anggaran berbasis skala prioritas sebagai variabel penentu tertinggi.

Regulasi Pengelolaan Dana BOS

Kerangka regulasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui melalui Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Pembaruan regulasi tersebut membawa penyempurnaan pada mekanisme perencanaan berbasis ARKAS yang lebih terintegrasi secara digital. Ningsi (2024) menunjukkan bahwa implementasi ARKAS secara konsisten mampu

meningkatkan transparansi dan kemudahan pemantauan penggunaan dana oleh dinas pendidikan melalui data yang diperbarui secara real-time.

Rahayuningsih (2020) menggarisbawahi bahwa pengelolaan dana BOS yang tertib harus melalui empat tahap berurutan: perencanaan melalui RKAS dan RAB, pelaksanaan yang mencakup penyaluran dan pencairan dana, pengawasan internal maupun eksternal, serta pelaporan yang dilakukan setiap triwulan. Saifrizal dan Yusuf (2023) menambahkan bahwa kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan menuntut kelengkapan dokumentasi yang ketat, termasuk bukti transaksi, kuitansi, dan berita acara yang dapat diverifikasi secara independent.

Peran Komite Sekolah dan Teknologi Digital

Mulyono (2010) menekankan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan yang partisipatif mensyaratkan keterlibatan aktif guru, komite sekolah, tenaga kependidikan, dan perwakilan orang tua agar seluruh aspirasi pemangku kepentingan dapat terakomodasi secara adil. Herawati dkk. (2020) menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi komite sekolah mengakibatkan peran pengawasan kerap tidak berjalan optimal, terutama karena keterbatasan pengetahuan teknis anggota komite tentang standar biaya dan petunjuk teknis BOS yang terus berkembang.

Dari sisi pemanfaatan teknologi, Prihanarko dan Hidayati (2023) menegaskan bahwa integrasi sistem informasi dalam manajemen pembiayaan secara signifikan meningkatkan daya guna dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Sejalan dengan itu, Rusmawana dan Mulya (2023) membuktikan bahwa sistem informasi pembayaran biaya sekolah berbasis Rapid Application Development (RAD) mampu menghasilkan laporan secara real-time dan meminimalisasi inkonsistensi data, sehingga rekonsiliasi keuangan menjadi lebih efisien dan andal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual (Creswell, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna di balik praktik pengelolaan keuangan sekolah yang tidak dapat tertangkap melalui data numerik semata. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan kriteria keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan keuangan sekolah. Informan yang terlibat terdiri atas bendahara BOS, sekretaris BPP, kepala sekolah, operator ARKAS, dan ketua komite sekolah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan dua informan kunci, yaitu sekretaris BPP dan bendahara BOS, menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan enam komponen manajemen pembiayaan menurut Matin (2014) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran. Kedua, observasi non-partisipan yang dilaksanakan selama tiga kunjungan ke sekolah: pada saat penyerahan surat tugas penelitian, wawancara dengan sekretaris BPP, dan wawancara dengan bendahara BOS. Ketiga, studi dokumentasi yang mencakup bukti pembayaran BPP bulanan, buku jurnal pemasukan dan pengeluaran BPP, serta dokumen RKAS yang tersedia di sekolah.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan berdasarkan analisis komprehensif atas seluruh data yang telah disajikan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dari ketiga teknik pengumpulan data yang digunakan, serta member check dengan informan untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 2 Palangka Raya, sebuah sekolah kejuruan negeri dengan beberapa program keahlian teknik yang memiliki karakteristik biaya operasional tinggi. Pengumpulan data berlangsung melalui tiga kunjungan lapangan dengan mengandalkan teknik wawancara langsung, observasi, dan studi dokumen. Analisis terhadap data yang terkumpul mengungkapkan bahwa pengelolaan dana BOS dan BPP secara prosedural telah mengikuti ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 jo. Nomor 63 Tahun 2023. Namun, sejumlah tantangan substantif pada aspek perencanaan berbasis prioritas, integrasi sistem digital, dan kapasitas pengawasan masih memerlukan perhatian serius.

Perencanaan Anggaran

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) di SMK Negeri 2 Palangka Raya dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan sarana prasarana, bendahara, serta perwakilan komite sekolah. Berdasarkan keterangan bendahara sekolah, prioritas utama penganggaran diberikan kepada kegiatan pembelajaran praktik dan perawatan

peralatan bengkel, mengingat karakteristik SMK yang menanggung biaya operasional jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah menengah umum.

Seluruh proses penyusunan RKAS telah dilakukan melalui aplikasi ARKAS sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 jo. Nomor 63 Tahun 2023. Rahayuningsih (2020) menegaskan bahwa perencanaan dana BOS yang akuntabel harus didasarkan pada kebutuhan riil dan disusun secara sistematis dalam dokumen RKAS dan RAB dengan menjunjung prinsip transparansi. Ningsi (2024) menambahkan bahwa penggunaan ARKAS secara konsisten meningkatkan kemudahan pemantauan penggunaan dana oleh dinas pendidikan karena seluruh rencana anggaran terdokumentasi dalam sistem digital yang dapat diakses kapan saja.

Meski demikian, ditemukan kelemahan mendasar berupa tidak adanya instrumen baku untuk mengukur tingkat urgensi setiap usulan program secara objektif. Ketidadaan alat ukur prioritas ini mengakibatkan sebagian alokasi dana BPP tersedot untuk kegiatan seremonial yang bersifat kurang strategis, sementara kebutuhan mendesak seperti penggantian suku cadang mesin praktik justru mengalami penundaan realisasi. Azhari dan Kurniady (2015) mengingatkan bahwa lemahnya pemahaman tentang tahap perencanaan dalam manajemen pembiayaan merupakan akar dari berbagai hambatan pencapaian mutu sekolah.

Pelaksanaan dan Penyaluran Dana BOS

Penyaluran dana BOS di SMK Negeri 2 Palangka Raya dilakukan dalam tiga tahap sesuai Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 jo. Nomor 63 Tahun 2023, yaitu tahap pertama untuk periode Januari-Maret, tahap kedua untuk periode April-Agustus, dan tahap ketiga untuk periode September-Desember. Pengambilan dana dilakukan secara kolektif oleh bendahara dan kepala sekolah melalui mekanisme transfer antarbank berbasis daring. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saisarani dan Sinarwati (2021) bahwa pengambilan dana BOS telah memanfaatkan layanan perbankan elektronik untuk mempercepat proses transaksi serta mengurangi risiko administratif.

Kendala klasik yang masih dihadapi adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, terutama pada awal tahun ajaran baru. Keterlambatan ini menyebabkan sekolah harus melakukan bon atau utang dagang kepada rekanan pemasok. Dari sisi efisiensi, praktik bon ini tidak ideal karena menimbulkan beban administrasi tambahan, risiko selisih harga, serta potensi konflik dengan pemasok. Penggunaan dana BOS difokuskan pada delapan komponen utama dari sebelas komponen yang tersedia dalam petunjuk teknis, meliputi penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan

ekstrakurikuler, pelaksanaan asesmen, administrasi kegiatan sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran, serta pembayaran honor.

Penatausahaan dan Pembukuan Keuangan

SMK Negeri 2 Palangka Raya telah menyusun pembukuan keuangan yang mencakup Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, serta Berita Acara Pemeriksaan Kas secara periodik. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat oleh bendahara BOS disertai bukti sah berupa kuitansi dan faktur resmi. Kelengkapan pembukuan ini sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Nahdliyah dan Sholiha (2022), yang menyatakan bahwa penatausahaan yang komprehensif sesuai kaidah akuntansi keuangan merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dana BOS.

Persoalan yang belum terselesaikan adalah keterbatasan penggunaan sistem informasi keuangan digital untuk pencatatan harian. Meskipun ARKAS difungsikan dalam perencanaan dan pelaporan formal, transaksi sehari-hari masih dicatat secara manual menggunakan buku fisik dan spreadsheet sederhana. Metode ini rentan terhadap kesalahan entri dan memperlambat proses rekonsiliasi anggaran. Prihanarko dan Hidayati (2023) menekankan bahwa integrasi sistem informasi secara menyeluruh, mulai dari pencatatan harian hingga pelaporan, merupakan kunci peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan sekolah. Rusmawana dan Mulya (2023) menguatkan temuan ini dengan membuktikan bahwa sistem informasi berbasis RAD mampu menghasilkan laporan secara real-time sekaligus mencegah inkonsistensi data antar periode.

Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan keuangan di SMK Negeri 2 Palangka Raya berjalan melalui dua jalur sekaligus. Secara internal, komite sekolah bersama pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten memantau penggunaan dana melalui rapat pleno dan laporan ringkas yang disampaikan setiap akhir semester. Secara eksternal, Dinas Pendidikan Provinsi dan Inspektorat melakukan audit dan pemeriksaan berkala terhadap realisasi anggaran. Meskipun kedua mekanisme ini telah berjalan, ketua komite sekolah mengakui bahwa keterlibatan komite masih lebih bersifat dukungan kebijakan daripada kontrol anggaran yang berbasis pemeriksaan bukti transaksi secara langsung.

Kondisi ini diperkuat oleh temuan Herawati dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan teknis anggota komite tentang standar biaya dan petunjuk teknis BOS menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan secara optimal. Matin (2014) menegaskan bahwa pengawasan yang efektif seharusnya mencakup evaluasi penggunaan anggaran secara berkala dan berbasis bukti, bukan hanya penerimaan laporan ringkasan tanpa

verifikasi lapangan. Ketimpangan antara kapasitas komite dan tuntutan regulasi ini memerlukan penguatan melalui pelatihan teknis yang terprogram dan berkelanjutan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) triwulan telah disusun dan diunggah melalui platform ARKAS/BOS Kementerian Pendidikan sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 jo. Nomor 63 Tahun 2023. Dokumen pertanggungjawaban yang disusun mencakup laporan realisasi penggunaan dana per komponen, rekapitulasi pengeluaran, dan laporan aset yang diperoleh dari dana BOS. Selain pelaporan formal kepada dinas, sekolah juga melakukan publikasi internal dengan menempelkan ringkasan laporan keuangan di papan pengumuman dan menyampaikannya dalam rapat pleno wali murid setiap akhir semester.

Hambatan yang kerap dihadapi adalah perubahan format petunjuk teknis di tengah tahun anggaran yang memaksa tim keuangan menyusun ulang dokumen LPJ yang telah disiapkan. Saisarani dan Sinarwati (2021) mencatat kendala serupa di SMA Negeri 4 Singaraja, yang diatasi melalui penyesuaian format dan koordinasi intensif dengan dinas terkait. Pengalaman ini menegaskan bahwa kapasitas adaptasi tim pengelola keuangan terhadap perubahan regulasi merupakan faktor penentu dalam menjaga konsistensi dan efisiensi pelaporan di tengah dinamika kebijakan.

Faktor Pendorong dan Penghambat Efisiensi

Tekanan utama yang mendorong penerapan prinsip efisiensi di SMK Negeri 2 Palangka Raya bersumber dari kesenjangan antara alokasi dana BOS yang diterima dengan total kebutuhan operasional riil sekolah. Kebutuhan yang paling terasa mencakup gaji tenaga honorer, pengadaan bahan habis pakai untuk praktik kejuruan, dan perawatan rutin mesin bengkel yang intensif. Untuk menjembatani kesenjangan ini, sekolah menerapkan mekanisme subsidi silang dalam pengelolaan BPP: siswa dari keluarga mampu membayar iuran penuh, sementara siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh keringanan atau pembebasan biaya. Pendekatan ini sejalan dengan praktik di SD Ta'mirul Islam Surakarta sebagaimana dilaporkan Alfaini (2022).

Di sisi lain, empat faktor penghambat utama berhasil diidentifikasi. Pertama, keterbatasan kompetensi akuntansi di kalangan tenaga pengelola keuangan sekolah. Kedua, belum tersedianya sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk pembukuan transaksi harian. Ketiga, perubahan regulasi yang bersifat mendadak di tengah tahun anggaran, yang mengganggu kesinambungan proses administrasi. Keempat, keterlambatan pencairan dana BOS dari pemerintah pusat yang berulang kali mengganggu likuiditas operasional sekolah. Handayani dkk. (2020) mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman tentang sistem

penganggaran merupakan penyebab struktural yang menghambat optimalisasi manajemen pembiayaan di banyak sekolah.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat konsepsi Mulyono (2010) bahwa efisiensi pembiayaan tidak semata-mata diukur dari minimalisasi pengeluaran, melainkan dari kemampuan menghasilkan output pendidikan yang maksimal dari sumber daya yang terbatas. Secara praktis, SMK Negeri 2 Palangka Raya perlu mengoptimalkan ARKAS tidak hanya untuk perencanaan dan pelaporan formal, tetapi juga untuk pencatatan transaksi harian, sekaligus menyelenggarakan pelatihan teknis yang terstruktur bagi bendahara dan anggota komite sekolah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dana BOS dan BPP di SMK Negeri 2 Palangka Raya telah mencapai kesesuaian prosedural yang memadai, mencakup perencanaan berbasis ARKAS, pelaksanaan penyaluran dana tiga tahap, pembukuan dengan buku kas dan bukti transaksi, pengawasan internal dan eksternal, serta pelaporan triwulan melalui platform digital. Secara regulasi, seluruh mekanisme merujuk pada Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 jo. Nomor 63 Tahun 2023 sebagai pedoman operasional yang mengikat.

Meski demikian, tiga tantangan substantif masih mengemuka: (1) perencanaan anggaran yang belum didukung instrumen prioritas yang objektif dan terukur; (2) sistem informasi keuangan digital yang belum terintegrasi untuk kebutuhan pembukuan harian; dan (3) fungsi pengawasan komite sekolah yang terkendala keterbatasan kapasitas teknis. Kesenjangan antara dana BOS yang tersedia dengan kebutuhan operasional riil-khususnya untuk praktik kejuruan, pemeliharaan bengkel, dan gaji tenaga honorer memaksa sekolah mengandalkan mekanisme subsidi silang dalam pengelolaan BPP.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan empat rekomendasi. Pertama, SMK Negeri 2 Palangka Raya perlu memperluas penggunaan ARKAS hingga mencakup pencatatan transaksi harian agar rekonsiliasi keuangan lebih akurat dan tepat waktu. Kedua, pelatihan teknis berkala bagi bendahara dan anggota komite sekolah tentang manajemen keuangan pendidikan dan petunjuk teknis BOS terkini perlu diagendakan secara rutin. Ketiga, sekolah perlu mengembangkan instrumen baku untuk mengukur tingkat urgensi dan prioritas setiap program dalam RKAS sebelum rapat penganggaran. Keempat, bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke beberapa SMK di Kalimantan Tengah dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna mengukur pengaruh efisiensi pengelolaan dana terhadap peningkatan mutu lulusan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada

cakupan satu sekolah serta tidak dilakukannya pengukuran kuantitatif terhadap hubungan antara tingkat efisiensi pengelolaan dan capaian mutu sekolah.

DAFTAR REFERENSI

Books :

- Arifudin, O., Sonia, N. R., Darmawan, I. P. A., Abbas, D. S., Saputro, A. N. C., Poltak, H., ... & Hasbi, I. (2021). *Manajemen pembiayaan pendidikan*. Widina Bhakti Persada.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). *SAGE Publications*.
- Matin. (2014). *Manajemen pembiayaan pendidikan: Konsep dan aplikasinya*. *Rajawali Pers*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). *SAGE Publications*.
- Mulyono. (2010). *Konsep pembiayaan pendidikan*. Ar-Ruzz Media.

Journal :

- Alfaini, I. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan di SD Ta'mirul Islam Surakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 115–130.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2015). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2), 26–38.
- Handayani, S., Nopiyani, & Suriansyah, A. (2020). Manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(4), 340–351.
- Herawati, E., Yuliana, L., & Nurdin, D. (2020). Peran dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(3), 201–215.
- Hikma, V. A., Abduloh, A., & Purnamaningsih, I. R. (2025). Implementasi Kebijakan Dana BOS Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 untuk Peningkatan Mutu Pendidikan. Ideguru: *Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(3), 2171-2180.
- Nahdliyah, K., & Sholiha, S. (2022). Pengelolaan dana BOS dan SPP di SD Darussalam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 89–104.
- Ningsi, S. (2024). Efektivitas pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menggunakan aplikasi ARKAS pada Sekolah Menengah Atas Yapis Biak. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1584–1596. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i3.3282>
- Noor, T. R., & Monita, E. (2022). Efisiensi alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 1–15.
- Prihanarko, A., & Hidayati, D. (2023). Pemanfaatan sistem informasi pada manajemen pembiayaan sekolah. *Manajemen Pendidikan*, 18(1), 71–82. <https://doi.org/10.23917/jmp.v18i1.21316>
- Rahayuningsih, S. (2020). Pengelolaan dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 178–195.

- Rusmawana, R., & Mulya, H. (2023). Sistem informasi pembayaran biaya sekolah menggunakan metode RAD. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 4(1), 55–68.
- Saifrizal, M., & Yusuf, Y. (2023). Pengelolaan keuangan dana BOS reguler dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 45–58.
- Saisarani, L. K., & Sinarwati, N. K. (2021). Pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(1), 1–15.